

## **PENGARUH JUMLAH TAGIHAN DAN JUMLAH OBJEK YANG DIBAYAR TERHADAP PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

(Studi kasus seluruh Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 -2016)

**Wawan Yulianto**

Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

Email: [wawankusuma86@gmail.com](mailto:wawankusuma86@gmail.com)

### **Abstract**

*This research was aimed to test is there any influence between indepent variables (amount of claim and amount of objects paid to dependent variables (PBB-P2 revenue) both partially and simultaneously. The data was collected from Income and Management Finance and Aset's District Departement in Gunungkidul regency, includes the amount of claim, amount of object paid, and PBB-P2 revenue.*

*Methodology of this research was correlation with 54 data. The sample was selected by purposive sampling with the type of data used was the secondary archive of data, with the unit of data of subdistrict during three years. Before doing hypothesis testing, the data was analyzed first by classical asumption testing. Hypothesis testing was conducted with double linear regression statistical analysis device.*

*The results of this research were as follows: (1) Testing partially showed that the amount of claim variable and the amount of object paid which was measured based on the Letter of Tax Object Notification has a significant and positive influence to PBB-P2 revenue. Testing simultaneously showed that the amount of claim and the amount of object paid which was measured based on SPPPT has a positive influence to PBB-P2 revenue.*

**Keywords:** *amount of claim, amount of object paid, and PBB-P2 revenue*

### **PENDAHULUAN**

Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Pajak daerah di Indonesia berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 terbagi menjadi dua, yaitu pajak propinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi Propinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Sehingga dalam otonomi daerah antara pemerintah dan masyarakat diberi kekuasaan dalam mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggungjawab.

Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber, salah satu sumber penerimaan tersebut adalah dari sektor penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dasar hukum pajak bumi dan bangunan yaitu undang-undang No.12 tahun 1994 yang menyatakan bahwa pada hakekatnya pembayaran pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sarana sebagai perwujudan kegotongroyongan nasional dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional, sehingga dalam pengenaannya harus memperhatikan prinsip kepastian hukum,

keadilan dan kesederhanaan serta ditunjang oleh sistem administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak.

Fenomena yang sedang berkembang di masyarakat saat ini adalah dilakukannya proyek pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) oleh pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Namun dalam pembangunan ini tidak sedikit tanah milik penduduk terkena imbasnya karena terkena dampak dari pelebaran Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS). Sehingga mau tidak mau rumah maupun tanah yang dimiliki warga tersebut harus digusur. Dengan adanya ganti rugi yang layak, warga yang lahannya terkena proyek JJLS bisa membangun kembali bangunan rumahnya ataupun membeli lahan baru sebagai ganti rugi tanah yang tergusur jalan. Maka dari itu sebidang lahan yang dulunya masih berupa pekarangan bisa jadi saat ini sudah berubah menjadi lahan dengan bangunan rumah di atasnya, tentu saja dalam hal ini data objeknya akan bertambah dikarenakan subyek pajak tersebut mendaftarkan objek pajaknya sebagai wajib pajak baru.

Hal pertama yang mungkin mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah jumlah tagihan yang diterbitkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). Sesuai dengan pasal 10 ayat (1) undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) pada dasarnya diterbitkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang disampaikan oleh subjek pajak. Berdasarkan penelitian dilakukan Purti (2015), diketahui bahwa jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan. Karena dengan bertambahnya jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang berisi jumlah pajak terhutang akan menambah potensi objek pajak, hal ini diharapkan dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Yogyakarta.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Handayani, dkk (2014), salah satu faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Kecamatan Jebres kota Surakarta adalah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tidak sampai kepada Wajib Pajak dikarenakan Wajib Pajak tidak berdomisili pada Objek Pajak.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan terjadi *research gap* untuk variabel jumlah tagihan yang diterbitkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sehingga perlu dilakukan penelitian kembali.

Hal kedua yang mungkin mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah jumlah objek yang dibayar berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Sesuai dengan ketentuan pasal 2 undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 ayat (1), yang menjadi objek pajak adalah bumi dan atau bangunan. Menurut penelitian Afriyana (2015), menjelaskan faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Tangerang adalah jumlah luas lahan dan bangunan.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatoni (2015), yang menjelaskan bahwa pengelolaan PBB sektor pedesaan dan perkotaan yang terdapat pada pemerintah Kabupaten Malang memiliki beberapa masalah, masalah tersebut adalah adanya penambahan objek pajak yang tidak terdata, artinya yang sebelumnya objek pajak berupa tanah kemudian diatas tanah tersebut telah didirikan bangunan, banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan terjadi *research gap* untuk variabel jumlah objek pajak yang dibayar berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sehingga perlu dilakukan penelitian kembali.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat dijelaskan bahwa dengan adanya proyek pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) warga yang terkena gusuran akan membangun ataupun membeli lahan baru, sehingga dalam hal ini data objeknya akan bertambah karena dengan adanya Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang masuk sebagai wajib pajak baru, maka dengan adanya hal tersebut akan berpengaruh terhadap jumlah tagihan yang diterbitkan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)

dan begitu pula akan berpengaruh terhadap jumlah objek yang dibayar berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh jumlah tagihan dan jumlah objek yang dibayar terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Gunungkidul”**.

## **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Jumlah Tagihan**

Jumlah tagihan adalah jumlah utang pajak yang timbul berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). Dengan adanya jumlah tagihan maka akan mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hasil penelitian Siregar (2015), menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan landasan teori tersebut, hipotesis alternatif terkait jumlah tagihan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ialah sebagai berikut:

**H1: Jumlah tagihan berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

### **Jumlah Objek Yang Dibayar**

Data objek pajak adalah data yang berupa bumi dan atau bangunan yang dimiliki dan dikuasai oleh wajib pajak. Dengan bertambahnya objek pajak maka akan berpengaruh terhadap jumlah objek yang dibayar oleh wajib pajak, sehingga jumlah objek akan mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hasil penelitian Afriyana (2015), menyatakan bahwa luas lahan dan jumlah bangunan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kecamatan-kecamatan Kota Tangerang.

Berdasarkan landasan teori tersebut, hipotesis alternatif terkait jumlah objek yang dibayar berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ialah sebagai berikut:

**H2: Jumlah objek yang dibayar berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).**

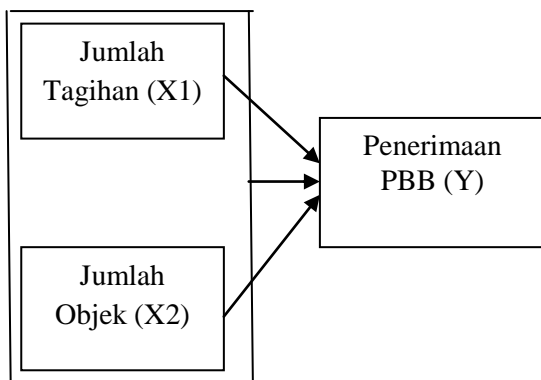
### **Jumlah Tagihan dan Jumlah Objek Yang Dibayar**

Hasil penelitian Putri (2015), membuktikan bahwa secara simultan atau bersama-sama antara variabel bebas (jumlah SPPT, NJOP, dan tunggakan pajak) berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Yogyakarta. Afriyana (2015), dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa jumlah wajib pajak, luas lahan, jumlah bangunan, dan laju inflasi secara simultan mempunyai pengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kota Tangerang.

Berdasarkan landasan teori tersebut, hipotesis alternatif terkait jumlah tagihan dan jumlah objek yang dibayar ialah sebagai berikut:

**H3: Jumlah tagihan dan jumlah objek yang dibayar berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).**

## **Kerangka Berfikir**



## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian korelasi. Penelitian korelasi adalah suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan, apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian korelasi merupakan bentuk penelitian untuk memeriksa hubungan diantara dua konsep. Secara umum ada dua jenis pernyataan yang menyatakan hubungan, yaitu: (1) gabungan antara dua konsep, adanya pengaruh dari suatu konsep terhadap konsep yang lain; (2) hubungan kausal, ada hubungan sebab akibat.

### Populasi dan Sampel

Seluruh kecamatan berdasarkan jumlah tagihan, jumlah objek yang dibayar dan penerimaan PBB setiap tahunnya yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan sampel dalam penelitian ini yaitu 18 kecamatan dikalikan tiga tahun data jumlah tagihan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan jumlah objek yang dibayar berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2014 sampai 2016. Jadi sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 54.

### Definisi operasional dan pengukuran variabel

- Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi Variabel Bebas (*Dependent/Y*) dalam penelitian ini. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu penerimaan pemerintah pusat yang sebagian besar hasilnya (90%) diserahkan kembali kepada daerah yang memungutnya. Peranan PBB bagi pemerintah daerah menjadi semakin bertambah penting sejak diberlakukannya undang-undang otonomi daerah dan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai akibat diserahkannya sebagian tugas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, Pemerintah pusat menyerahkan kembali bagiannya kepada daerah, sehingga di luar biaya pemungutan, pemerintah daerah akan menerima sepenuhnya hasil dari pajak bumi dan bangunan (Makmur, 2010).
- Jumlah tagihan merupakan jumlah pajak terutang yang diterbitkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Selain berfungsi untuk menimbulkan utang pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) juga berfungsi untuk menetapkan jumlah utang pajak dan memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak. Timbulnya utang pajak pada pajak bumi dan bangunan bersamaan dengan penetapan dan pemberitahuan utang pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, yaitu pada saat fiskus menetapkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tersebut (Siahaan, 2009).
- Jumlah objek yang dimaksud adalah data jumlah bumi dan atau bangunan yang dimiliki dan dikuasai oleh wajib pajak. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang (Mardiasmo, 2011).

### Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan metode statistik deskriptif dan analisis regresi berganda dalam pengujian hipotesis.

### Statistik Deskriptif

Menurut Jogiyanto (2013), statistik deskriptif adalah statistik yang menggambarkan fenomena atau karakteristik dari data. Karakteristik data yang digambarkan adalah

karakteristik kontribusinya. Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data yang ada pada penelitian ini yang terdiri dari jumlah tagihan dan jumlah objek yang dibayar.

#### **Uji Asumsi Klasik**

##### **Uji Normalitas Data**

Ghozali (2011), menyatakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika hal tersebut dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid atau jumlah sampel kecil. Untuk mendeteksi suatu residual berdistribusi normal atau tidak adalah dengan dilakukan dengan dua cara yaitu, analisis grafik dan uji statistik.

##### **Uji Multikolinearitas**

Menurut Ghozali (2011), untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen dilakukanlah uji multikolinearitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas di dalam sebuah model regresi dapat dicermati dari hal-hal berikut:

- a            Jika nilai *tolerance*-nya kurang dari 0,10 maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinieritas dan sebaliknya jika nilai *tolerance* lebih dari 0,10 maka terjadi multikolinearitas.
- b            Jika nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) kurang dari 10, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas, dan sebaliknya jika nilai VIF diatas 10, maka terjadi multikolinearitas.

##### **Uji Heteroskedastisitas**

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Apabila *variance* dari satu residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut homokedastisitas, sedangkan jika *variance* nya berbeda maka disebut heterokedastisitas (Ghozali, 2011).

##### **Uji Autokorelasi**

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode *t* dengan kesalahan pengganggu pada *t-1*. Jika terdapat kesalahan autokorelasi, maka disebut *problem* autokorelasi (Ghozali, 2011).

#### **Analisis Regresi Linier Berganda**

##### **Pengujian Hipotesis**

Dalam penelitian ini, model pengujian hipotesis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y        = Penerimaan PBB

$\alpha$      = Konstanta

$\beta_1, \beta_2$  = koefisien regresi

$x_1$      = Jumlah tagihan

$x_2$      = Jumlah objek yang dibayar

$\varepsilon$      = Error

Dalam analisis linear berganda ada tiga uji untuk menguji hipotesis, yaitu uji parsial (uji statistik t), uji simultan (uji statistik f), dan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ).

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Uji Normalitas Data**

Hasil uji normalitas terlihat nilai *Kolmogorov-Smirnov Z* adalah 0,82 dengan signifikansi (*Asymp.Sig.*) pada 0,200. Melalui hasil pengujian inimenunjukkan bahwa probabilitas

signifikansi residual yang dihasilkan yaitu 0,200 lebih besar dari pada 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa semua variabel yang sedang diuji terdistribusi secara normal karena probabilitas signifikansi dari hasil pengujian tersebut sebesar  $20,0\% \geq 5\%$ .

#### Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikoleniaritas nilai toleransi dari variabel jumlah tagihan sebesar 0,567 dan variabel jumlah objek yang dibayar sebesar 0,567 menunjukkan nilai yang lebih dari 0,10. Hal ini berarti bahwa tidak terjadi mltikolinearitas antar variabel. Selain itu nilai VIF untuk variabel jumlah tagihan 1.764 dan variabel jumlah objek yang dibayar 1.764 atau tidak lebih dari 10, jadi tidak ada gejala multikolinearitas dalam regresi.

#### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas yang digunakan pada penelitian ini adalah *Uji Park*. Dalam *uji Park* dapat dijelaskan, apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik. Hasil *uji park* terhadap variabel-variabel independen penelitian memiliki nilai masing-masing sebesar 0,074 dan 0,095 yang lebih besar dari tingkat signifikansi statistik sebesar 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa varians penelitian tidak mengalami efek heterokedastisitas atau varians data adalah homokedastisitas maka penelitian ini lolos uji heterokedastisitas.

#### Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil uji autokorelasi diperoleh hasil *test value* sebesar -522.20918 dan signifikansi (*Asymp. Sig*) sebesar 0,169. Hal ini menunjukkan bahwa probabilitas signifikansi residual yaitu 0,169 lebih besar dari 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

#### Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil analisis regresi linear berganda

#### Uji Statistik t

Tabel.1 Hasil Uji t Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-384.911	1925.767		-.200	.842
	Tagihan	.719	.008	.946	88.005	.000
	Objek	.542	.076	.076	7.096	.000

a. Dependent Variable: y

Data: sekunder diolah tahun 2017

Berdasarkan hasil analisis diatas maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -3384.911 + 719 X_1 + 542 X_2$$

Hasil uji statistik t pada tabel diatas untuk variabel jumlah tagihan yang diukur berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) (X1) menunjukkan nilai t hitung sebesar  $88.005 > 1.6753$  t tabel dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah tagihan yang diukur berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penermaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Hasil uji statistik t untuk variabel jumlah objek yang dibayar yang diukur berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (X2) menunjukkan nilai t hitung sebesar  $7.096 > 1.6753$  t tabel dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05.

Hal ini menunjukkan bahwa  $H_{a2}$  diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah objek yang dibayar yang diukur berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).  
**Uji Statistik F**

**Tabel.2 Hasil Uji F  
ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	161855450704.244	2	80927725352.122	7600.642	.000 <sup>b</sup>
Residual	543021771.328	51	10647485.712		
Total	162398472475.572	53			

a. Dependent Variable: y

b. Predictors: (Constant), x2, x1

Data: sekunder diolah tahun 2017

Dari hasil uji statistik F yang terdapat pada tabel diatas dapat diperoleh nilai profitabilitas (F hitung) sebesar 7600.642 dengan tingkat signifikan dibawah 0,05 yaitu 0,000. Berdasarkan cara pengambilan keputusan uji simultan dalam analisis regresi dapat disimpulkan sebagai berikut.

#### **Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Berdasarkan tampilan output model summary besarnya *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,997. Dengan menggunakan *Adjusted R Square*, jumlah tagihan yang diukur berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) (X1) dan jumlah objek yang dibayar yang diukur berdasarkan Surat Pemberitahuan

Hasil uji F berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) (X1) dan jumlah objek yang dibayar yang diukur berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) (X2) jika diuji secara bersama-sama atau serempak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan, sehingga  $H_{a3}$  diterima.

Pajak Terhutang (SPPT) (X2) dapat menjelaskan penerimaan pajak bumi dan bangunan (Y) sebesar 99,7% dan sisanya (100%-99,7%=0,3%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil uji  $R^2$  dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1.3 Uji  $R^2$   
Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.998 <sup>a</sup>	.997	.997	3263.0485305

a. Predictors: (Constant), x2, x1

c. Dependent Variable: y

Data: sekunder diolah tahun 2017

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut: Secara parsial pengaruh jumlah tagihan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Gunungkidul periode tahun 2014 sampai 2016. Hasil

penelitian ini sejalan dengan penelitian Siregar (2015), dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa SPPT berpengaruh secara parsial terhadap keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pekanbaru. Secara parsial pengaruh jumlah objek yang dibayar berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2014 sampai 2016. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Afriyanah (2015), yang menyatakan bahwa secara parsial luas lahan dan jumlah bangunan memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Tangerang. Secara simultan pengaruh jumlah tagihan dan jumlah objek yang dibayar yang diukur berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sama-sama berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Gunungkidul tahun 2014 sampai 2016. Hasil ini sejalan dengan penelitian Putri (2015), yang menyatakan bahwa jumlah SPPT, NJOP, dan tunggakan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan PBB. Diperkuat oleh penelitian Afriyanah (2015), menjelaskan bahwa jumlah wajib pajak, luas lahan, jumlah bangunan, dan laju inflasi secara simultan memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Tangerang.

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu peneliti hanya menggunakan dua variabel yaitu jumlah tagihan dan jumlah objek yang dibayar yang diukur berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afriyanah, (2015). "Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Luas Lahan, Jumlah Bangunan, dan Laju Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Di Kota Tangerang". *Jurnal Ultima Accounting Vol.7. No.1,2015, Universitas Multimedia Nusantara*.
- Fatoni, Ahmad Hardiyansah. (2015). "Upaya Peningkatan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang". *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*.
- Ghozali, Imam. (2011). "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IMB SPSS 21". Edisi ketujuh. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Handayani, Witiya Tri, dkk. (2014). "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kecamatan Jebres Kota Surakarta". *Jupe UNS, Vol 2, No 3, Hal 224 s/d 237. Pendidikan Ekonomi-BKK Akuntansi, FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta*.
- Hartanto, Jogyanto, 2013. Metodologi Penelitian Bisnis. Edisi VI. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Mardiasmo.(2011). "Perpajakan Edisi Revisi" Penerbit C.V ANDI OFFSET.Yogyakarta.
- Makmur, 2010."Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan PBB-Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kutai Barat". *Jurnal staf pengajar jurusan akuntansi politeknik negeri Samarinda*.
- Putri, Elisabeth Tilana Mutiara. (2015). "Pengaruh Jumlah SPPT, Nilai Jual Objek Pajak, dan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Yogyakarta". *Jurnal Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.



- Siahaan, Mariot Pahala. (2009). "Tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia". *Edisi Pertama. Yogyakarta. Graha Ilmu. Yogyakarta*
- Siregar, Rizka Wahyuni. (2015). "Pengaruh Sikap Wajib Pajak Mengenai Fungsi Pajak, Persepsi Wajib Pajak Dalam Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, Dan SPPT Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB Kota Pekanbaru". *JOM.FEKON Vol. 2 No. 2 Oktober 2015. Fakultas Ekonomi, Universitas Riau, Pekanbaru.*

### **Peraturan Perpajakan**

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985.